

Daftar Isi ...

Pengantar Penulis -- v

Pengantar Ahli: Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H. -- vii

Pengantar Penerbit -- ix

Daftar Isi -- xi

Daftar Tabel -- xv

Daftar Gambar -- xvi

Bab 1. Prawacana: Dari Sindrom Peraturan Daerah Bermasalah Menuju Pembentukan Peraturan Daerah Responsif -- 1

Bab 2. Fondasi Hukum Perundang-undangan -- 15

A. Hukum sebagai Sistem -- 16

B. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan -- 24

1. Ilmu dan Teori Perundang-undangan -- 24

2. Istilah Peraturan Perundang-undangan -- 27

C. Fungsi Peraturan Perundang-undangan -- 29

1. Fungsi Hukum pada Umumnya -- 29

2. Fungsi Internal dan Eksternal Peraturan Perundang-undangan -- 32

- D. Keberlakuan Peraturan Perundang-undangan -- 35
 - 1. Keberlakuan Filosofis -- 37
 - 2. Keberlakuan Juridis -- 38
 - 3. Keberlakuan Politis -- 39
 - 4. Keberlakuan Sosiologis -- 39
- E. Efektivitas Hukum, Ketaatan Hukum, dan Bekerjanya Perundang-undangan -- 41
 - 1. Faktor-faktor Efektivitas Hukum -- 41
 - 2. Ketaatan Hukum -- 49
 - 3. Bekerjanya Perundang-undangan -- 53

Bab 3. Fondasi Teori Pembentukan Peraturan Daerah Responsif -- 55

- A. Teori Hukum Responsif -- 55
- B. Teori Partisipasi Masyarakat -- 63
 - 1. Pengertian Partisipasi dan Eksistensinya sebagai Hak Dasar Masyarakat -- 63
 - 2. Tahap-tahap Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif -- 73
 - a. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Ante Legislative -- 75
 - b. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Legislative -- 76
 - c. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Post Legislative -- 79
- C. Konsepsi Peraturan Daerah -- 81

Bab 4. Desentralisasi dan Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah -- 86

- A. Desentralisasi dan Otonomi Daerah -- 86
 - 1. Pengertian dan Jenis Desentralisasi -- 86
 - 2. Hubungan Desentralisasi dan Otonomi Daerah -- 96
 - 3. Ajaran Rumah Tangga Daerah -- 99
- B. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah -- 106

Bab 5. Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Responsif -- 111

A. Landasan dan Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah Responsif -- 112

1. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah Responsif -- 112

- a. Landasan Filosofis -- 112
- b. Landasan Yuridis -- 113
- c. Landasan Sosiologis -- 115
- d. Landasan Politik -- 116
- e. Landasan Ekologis -- 117
- f. Landasan Ekonomi -- 118
- g. Landasan Kultural -- 119

2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif -- 119

- a. Pengertian Asas-asas Hukum -- 119
- b. Fungsi Asas-asas Pembentukan --
- c. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah Responsif -- 123

B. Metode Pembentukan Peraturan Daerah Responsif -- 132

1. Metode Reed Dickerson -- 132

2. Metode ROCCIP -- 134

- a. Laporan Penelitian (Research Report) -- 134
- b. Penyusunan Draft Peraturan Perundang-undangan (Perda) -- 136
- c. Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology -- 137

3. Metode *Regulatory Impact Assessments* (RIA) -- 139

4. Metode LP2K3 oleh Achmad Ruslan -- 143

- a. Mengenal Teori Three Pillars of Quality of Legal Product -- 143
- b. Metode LP2K3 sebagai Metode Aplikatif Teori Three Pillars of Quality of Legal Product -- 147

C. Urgensi Naskah Akademik, Teknik Penyusunannya, dan Proses Pembuatannya yang Responsif -- 153

1. Urgensi Naskah Akademik -- 153
2. Teknik Penyusunan Naskah Akademik -- 160
3. Proses Penyusunan Naskah Akademik Responsif -- 168

Bab 6. Acuan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya -- 173

- A. Teknik Perundang-undangan -- 173
- B. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya Berdasarkan Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan -- 177

Indeks -- 281

Glosarium -- 287

Daftar Pustaka -- 296

Tentang Penulis -- 304